



FUNGSI SOSIAL RUANG PUBLIK (Studi Kasus Ruang Tepi Laut Kota Makassar)

Zakaria Ibrahim¹, Rahmat Muhammad², Sawedi Muhammad³

^{1,2,3}Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

History Article

Article history:

Received July 15, 2023

Approved August 18, 2023

Keywords:

Function, Public Space, Beachfront

ABSTRACT

This research is motivated by urban waterfront spaces that are experiencing changes in social function, from shared living spaces to private spaces to become a handful of people who are economically capable. This study aims to determine the social function of waterfront space in Makassar City. This research uses a qualitative approach with a case study type. Data collection was carried out through in-depth interviews, participatory observation and documentation. Handling of informants follows a purposive procedure, namely determining in advance the group of informants who will be used as data sources with certain criteria. The informants of this study consisted of the indigenous people of the city of Makassar, immigrant communities and urban spatial planning experts. The results of this study indicate that the city's waterfront space which was previously a space for living together, a place for fishing boats to dock and dock, a place for welcoming families out to sea, a place for bargaining for fish buyers, has now become largely privatized for capital accumulation. The daily activities of fishing communities, which are a social function of the waterfront, are increasingly fading along with the management of coastal space as a tourist spot. Spaces that used to be easily accessible, time-free, cost-free have now been turned upside down. These spaces are now only accessible to social classes who have economic ability. As a beachside public space, its social function is disrupted because not all levels of society can access it. As a result, socio-economic class is quite difficult because it requires a lot of money. Waterfront public space has been socially degraded based on economic capacity.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ruang tepi laut perkotaan yang mengalami perubahan fungsi sosial, dari ruang hidup bersama menjadi ruang privat bagi segelintir orang yang mampu secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi sosial ruang tepi laut kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan dokumentasi. Penentuan informan mengikuti prosedur purposif, yakni menentukan terlebih dahulu kelompok informan yang akan dijadikan sebagai sumber data dengan kriteria tertentu. Informan penelitian ini terdiri dari masyarakat asli kota Makassar, masyarakat pendatang dan pakar tata ruang kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ruang tepi laut kota yang sebelumnya menjadi ruang hidup bersama, tempat kapal nelayan bertolak dan bersandar, tempat lepas sambut keluarga melaut, tempat tawar menawar pembeli ikan, kini sebagian besar telah diprivatisasi untuk akumulasi kapital. Aktivitas keseharian masyarakat nelayan yang menjadi fungsi sosial tepi laut telah memudar seiring dengan pengelolaan ruang tepi laut menjadi tempat wisata. Ruang yang awalnya dapat diakses dengan mudah, bebas waktu, tanpa biaya kini telah berbanding terbalik. Ruang-ruang tersebut sekarang hanya mampu diakses oleh kelas sosial yang memiliki kemampuan ekonomi. Sebagai ruang publik tepi laut, fungsi sosialnya mengalami gangguan karena tidak semua lapisan masyarakat dapat mengaksesnya. Alhasil, kelas sosial ekonomi lemah cukup sulit lantaran memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ruang publik tepi laut telah mensegregasi sosial berdasarkan kemampuan ekonomi.

© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education

*Corresponding author email: adi831438@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan media atau ruang untuk melakukan interaksi sosial dengan orang lain, salah satunya melalui fasilitas ruang publik. Kebutuhan ini terutama untuk kalangan menengah ke bawah karena mereka memiliki keterbatasan biaya dalam mengakses atau menggunakan ruang privat atau semi privat (Surjana, 2017). Batasan dan tipologi ruang terbuka publik yaitu taman-taman publik (*public parks*), tepi laut (*water fronts*), lapangan dan plaza (*square and plaza*), taman peringatan (*memorial parks*), pasar (*markets*), jalan (*streets*), lapangan bermain (*playground*), ruang terbuka untuk masyarakat (*community open spaces*), jalan hijau dan jalan taman (*green ways and park ways*), atrium/pasar tertutup (*atrium /indoor markets place*), pasar/pusat perbelanjaan pusat kota (*market place/down town shopping center*) (Chua & Edwards, 1992).

Ruang publik adalah ruang yang dapat mengakomodir kepentingan publik atau masyarakat umum (Sunaryo, 2010). Misalnya berkomunikasi dengan rekan kerja, pertemuan komunitas informal tertentu, bermain bersama, jajanan, berjalan-jalan, bersantai melepas penat, melihat-lihat atau memperhatikan aktivitas orang-orang di sekitar dan sebagainya (Darmawan, 2005). Ruang publik menjadi ruang bersama, kaya dan miskin, tua dan muda, laki-laki dan perempuan (Asriany et al., 2011). Ruang publik atau ruang terbuka dapat dijabarkan sebagai ruang diluar bangunan, (Kurniawati, 2021). Ruang publik merupakan salah satu fasilitas penunjang yang harus disediakan bagi masyarakat di suatu kawasan perkotaan (Sugiyanto & Sitohang, 2017). Penyediaan ruang publik dapat dijadikan sebagai sarana yang mempunyai manfaat besar bagi peningkatan kualitas lingkungan, keindahan, kesegaran, kenyamanan serta mampu mengurangi pencemaran sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan terciptanya keserasian lingkungan .

Keberadaan ruang publik merupakan bagian penting masyarakat sebagai upaya mengatasi konflik sosial yang mengarah pada terciptanya disharmoni dan disintegrasi sosial (Budihardjo & Sujarto, 1999). Kebutuhan masyarakat akan sarana untuk melakukan aktivitas dengan berbagai aktivitasnya diwujudkan melalui interaksi sosial yang diakomodir dalam ruang publik. Ruang Publik menjadi arena bersama antara manusia satu dengan manusia lainnya, masyarakat yang satu dengan yang lainnya berlangsung secara terus menerus. Hingga akhirnya ada satu kesatuan pemahaman bersama bahwa heterogenitas dalam satu kota merupakan keniscayaan yang harus diinternalisasi dan diterima bersama, maka ruang publik menjadi ruang kebebasan bagi masyarakat untuk bergerak setara (Malik, 2018).

Ruang publik muncul sebagai suatu wilayah dan bagian yang spesifik dari masyarakat sipil sebagai tempat terjadinya pertukaran komoditas dan kerja sosial yang diatur oleh kaidahnya sendiri (Latuapo, 2022). Istilah ruang publik (*public sphere*) berawal dari pendapat Jurgen Habermas pada tahun 1962 dalam tulisannya yang kemudian diterjemahkan pada tahun 1991 berjudul *The Structural Transformation of The Public Sphere*. *Public sphere* adalah ruang terjadinya berbagai diskusi dan debat publik mengenai suatu permasalahan publik, di mana setiap individu sebagai bagian dari publik mempunyai porsi yang sama dalam berpendapat dan dijamin kebebasannya dari intervensi dan restriksi pihak lain sehingga tidak memunculkan hegemoni opini namun menumbuhkan opini publik yang diharapkan akan membantu munculnya kebijakan publik yang adil (Jurgen, 1991).

Berdasarkan kesepakatan formal dan komunikasi massa, ruang publik bertransformasi menjadi ruang interaksi. Dalam hal ini ruang publik dipandang tidak terbentuk dari sebuah aktivitas atau proses komunikasi akan tetapi berdasarkan adanya akses (Brodin, 2006). Artinya perilaku dan komunikasi yang dilakukan oleh berbagai individu berorientasi terhadap orang lain melalui pemanfaatan berbagai akses bagi publik sebagai subjek. Salah satu aspek penting peranan ruang publik menurut Carmona et al. (2008) adalah aspek sosial. Ruang publik menyediakan ruang bagi interaksi dan pembelajaran sosial pada segala usia, mengurangi resiko terjadinya kejahatan dan sikap anti sosial.

Salah satu ruang publik kebanggaan Kota Makassar adalah tepi laut. Kota Makassar memiliki pesisir pantai sepanjang 32 km dan mencakup 11 pulau-pulau kecil dengan luas keseluruhan mencapai 122.370 Ha atau sekitar 1,1% dari luas wilayah daratannya (Arif et al., 2022). Namun beberapa ruang publik tersebut telah diprivatisasi menjadi kawasan wisata, seperti Pantai Losari, Pantai Tanjung Bayang, Pantai Tanjung Anging Mamiri, Pantai Tanjung Merdeka (Maruzy, 2020), Pantai Akkarena, Pantai Tanjung Layar Putih, Pantai Pulau Kodingareng Keke, Pantai Pulau Kayangan, Pantai Pulau Samalona (Piknik Wisata, 2023), Pantai Pulau Lae-Lae, Pantai Pulau Lanjukung (Tripceera, 2023).

Peranan ruang publik tepi laut Kota Makassar yang menyediakan ruang interaksi sosial yang setara telah menjadi eksklusif dan hanya dapat diakses oleh sebagian kecil masyarakat yang mampu secara ekonomi. Dengan pengelolaan ruang publik tepi laut menjadi kawasan wisata akan merubah fungsi sosialnya, maka penting untuk melihat fungsi sosial ruang publik tepi laut Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian studi kasus ini pada dasarnya berfokus pada satu objek yang diangkat sebagai kasus untuk dikaji secara mendalam dan detail sehingga dapat mengungkap realitas dibalik fenomena tersebut (Rahardjo, 2017; Dewi, 2019). Fokus studi kasus adalah spesifikasi suatu kasus dalam suatu kejadian baik berupa entitas yang konkrit, misalnya individu, kelompok kecil, organisasi atau kemitraan (Yin, 2009). Dengan menggunakan studi kasus, peneliti dapat memperoleh informasi langsung dan terkini tentang masalah yang sedang dipelajari (Lincoln, 1995). Penelitian ini termasuk dalam jenis studi kasus instrumental karena bertujuan untuk memahami isu, masalah, keprihatinan dan menggali konsep atau mengilustrasikan suatu masalah (Stake, 1995). Penelitian ini menjadikan unit kasus masyarakat kota Makassar untuk mengeksplorasi konsep fungsi sosial ruang publik. Penentuan informan dalam penelitian ini mengikuti prosedur purposive yaitu menentukan terlebih dahulu kelompok informan yang akan dijadikan sumber data, tentunya dengan memenuhi kriteria yang telah disesuaikan dengan tujuan penelitian (Sayidah, 2018). Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data menurut Creswell (2017) secara keseluruhan melibatkan pemaknaan data. Teknik analisis data yang dimaksud di sini adalah upaya yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data, mengorganisasikan data, mengelola dan menyintesis data, serta mengkaji dan memutuskan dari apa yang disampaikan oleh informan. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, Sulawesi Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ruang Publik Tepi Laut Kota Makassar

Ruang publik memiliki fungsi utama memberikan akses bebas bagi siapa saja yang masuk dan menggunakannya. Ini juga yang membedakannya dengan *private room* atau *paid room*. Selain itu menurut Siahaan (2010), ruang publik ditandai oleh tiga hal yaitu responsif, demokratis dan bermakna. Responsif, dalam arti ruang publik merupakan ruang yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan yang luas. Demokratis, artinya ruang publik dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya serta dapat diakses oleh berbagai kondisi fisik manusia. Bermakna, artinya ruang publik harus memiliki keterkaitan antara manusia, ruang, dan dunia yang lebih luas dengan konteks sosial.

Perkembangan kota Makassar mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan pembangunan yang memanfaatkan tepi laut menjadi kawasan perdagangan komersial dan kawasan fungsional lainnya yang telah memperkecil peluang penduduk untuk dapat mengakses laut dan ruang tepinya. Menurut Syafriny et al. (2013), kehadiran fungsi dan layanan komersial yang mendominasi kawasan pengembangan sering tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas ruang terbuka publik berdimensi sosial sebagai tempat warga kota melakukan aktivitas sosial. Khusus untuk Kota Makassar, akses masyarakat untuk kegiatan sosial ke ruang pantai sudah terbatas akibat munculnya berbagai tempat komersial seperti wisata tepi laut.

Ruang tepi laut merupakan tempat dinamis yang merupakan batas alam di mana terdapat berbagai pemanfaatan yang kompleks dengan berbagai kondisi energi yang dramatis. Secara fisik, kawasan ini merupakan persilangan antara zona air dan daratan, zona pasang dan surut yang sering menampung aktivitas sosial, tempat keindahan alam. Suatu kawasan yang meliputi kegiatan atau bangunan yang secara fisik, sosial ekonomi dan budaya dipengaruhi oleh karakteristik suatu badan air (Ditjen Penataan Ruang, 2004).

Dalam perkembangan kawasan kota pesisir dikenal istilah *Waterfront* yang dalam bahasa Indonesia secara harfiah berarti kawasan tepi laut, bagian kota yang berbatasan dengan air (Echols & Shadily, 2008). Istilah ini kemudian berkembang menjadi *urban waterfront* yang berarti lingkungan perkotaan yang berada di tepi atau dekat perairan (Wrenn, 1983). Munculnya istilah *waterfront* terkait dengan sejarah pemanfaatan ruang di perbatasan perairan laut dan darat, dimana pada era tertentu terjadi perubahan fungsi kota dan kawasan perairannya dimana kota

industri sebagai pusat produksi berubah menjadi kota pasca industri sebagai pusat konsumsi (Campo, 2002; Dovey, 2005; Doucet, 2010).

Beberapa ruang publik tepi laut yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat Kota Makassar yaitu ialah Pantai Losari, Pantai Tanjung Bayang, Pantai Tanjung Anjing Mamiri, Pantai Tanjung Merdeka, Pantai Akkarena, Pantai Tanjung Layar Putih, Pantai Pulau Kodingareng Keke, Pantai Pulau Kayangan, Pantai Pulau Samalona, Pantai Pulau Lae-Lae, Pantai Pulau Lanjukang dan lain sebagainya.

2. Fungsi Sosial Ruang Publik Tepi Laut Kota Makassar

Fungsi sosial utama ruang publik tepi laut adalah untuk menampung aktivitas masyarakat di luar bangunan. Menurut Soenarno (2002) fungsi utama ruang publik adalah sebagai wahana interaksi antar manusia untuk berbagai keperluan. Dalam hal ini, ruang publik merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial. Selain itu, ruang publik juga berfungsi memberikan nilai tambah bagi lingkungan, misalnya dalam hal estetika kota, pengendalian polusi udara, pengendalian iklim mikro, dan memberikan citra suatu kota. Jika fungsi sosial ruang terbuka publik berjalan dengan baik, maka akan dikunjungi oleh berbagai lapisan masyarakat, berbagai tingkatan pendidikan, berbagai tingkatan ekonomi, berbagai tingkatan usia dan berbagai kepentingan yang ada. Namun, jika ruang publik tepi laut telah dikomersialkan dalam bentuk tempat wisata, tentu akan mengganggu fungsi sosialnya.

Fungsi sosial ruang publik tepi laut kota Makassar secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, sebagai sarana aktivitas keseharian masyarakat sekitar dan sebagai sarana aktivitas pengunjung.

a. Sarana Aktivitas Keseharian Masyarakat Sekitar

Masyarakat Makassar dan umumnya masyarakat di Sulawesi Selatan terkenal sebagai pelaut ulung. Sebagai pelaut kehidupannya tergantung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka umumnya tinggal dipinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan pekerjaannya. Sebagai masyarakat yang sudah lama berinteraksi dengan kehidupan laut, mereka bahkan memiliki struktur sosial pelaut yang dikenal dengan istilah lokal Punggawa-Sawi.

Pelaut Makassar umumnya seorang laki-laki. Ada yang melaut secara berkelompok dengan mengoperasikan kapal besar ada pula yang mandiri menggunakan kapal kecil. Semakin besar suatu kapal yang digunakan, maka semakin banyak awak kapal, semakin jauh jangkauan kapal, semakin lama durasinya di laut dan semakin banyak hasil tangkapannya. Sebaliknya untuk kapal ukuran kecil.

Bagi masyarakat yang berkerja ditengah-tengah lautan, lingkungan fisik laut sangatlah mengandung banyak bahaya. Dalam berbagai hal bekerja dilingkungan laut penuh dengan resiko. Karena pekerjaan pelaut dalah memburu ikan, hasilnya tidak dapat ditentukan kepastiannya, semuanya hampir serba spekulatif.

“Kalau pakai kapal besar, berarti banyak orang ikut, lokasi penangkapan jauh, dan waktunya bisa berbulan-bulan tapi biasa banyak hasil tangkapannya. Sebenarnya, pendapatan nelayan itu tidak menentu, bisa dikatakan untung-untungan” (Wawancara dengan AB)

Karena resiko melaut yang tinggi, perhatian keluarga pelaut menjadi sangat besar. Para pelaut Makassar biasanya akan diantar oleh istri dan anak-anaknya ke tepi laut dengan penuh haru dan doa, berharap tidak menjadi pertemuan terakhir. Ketika tiba jadwal kapal berlabuh, keluarga akan menunggu dengan sabar di tepi laut. Tidak lama berselang, masyarakat sekitar yang mau membeli ikan berdatangan. Geliat tawar-menawar segera memecah kesunyian.

“Dulu keluarga, istri dan anak biasa mengantar di pinggir laut. Kan saya pakai kapal kecil, malamnya berangkat dan paginya sudah pulang. Kalau pulang pagi, biasa ada juga keluarga yang menunggu di pinggir laut” (Wawancara dengan R)

Aktivitas keseharian seperti ini dulu lumrah terjadi di tepi-tepi pantai Kota Makassar. Namun, setelah Makassar menjadi kota industri, aktivitas melaut masyarakatnya mulai memudar. Mereka mulai banyak mencoba peruntungan di sektor darat. Hanya sebagian kecil masyarakat kota Makassar yang masih bertahan dengan cara melaut, itupun umumnya mengoperasikan kapal-kapal kecil.

Ruang publik tepi laut kota Makassar menjadi tempat aktivitas keseharian dari masyarakat yang masih bertahan menjadi pelaut. Mereka menggunakan pantai sebagai titik tolak menuju laut untuk mencari nafkah dan juga menjadikannya tempat berlabuh kapal untuk membongkar dan menjual hasil tangkapannya.

“Sekarang, tinggal sedikit masyarakat di sini yang bekerja sebagai pelaut. Itupun kalau ada, mereka pakai kapal kecil mami. Biasa kapalnya disimpan di sini. Kadang juga ditarik naik ke pantai. Pelaut dan keluarganya banyak yang bekerja di darat” (Wawancara dengan M)

Setelah pengelolaan ruang publik tepi laut menjadi tempat wisata, para nelayan tidak lagi bebas bertolak dan berlabuh di pinggiran laut karena persoalan estetika dan berpotensi mengganggu kenyamanan pengunjung. Kebiasaan haru lepas sambut keluarga pelaut di tepi laut, gemuruh suara tawar-menawar pembeli ikan, kerumunan masyarakat sekitar tepi laut lambat laun menghilang. Aktivitas keseharian masyarakat nelayan yang menjadi fungsi sosial tepi laut telah memudar seiring dengan perkembangan wisata.

b. Sarana Aktivitas Pengunjung

Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang memiliki ketergantungan dengan manusia lainnya. Ruang publik tepi laut dapat dijadikan sebagai pengejawantahan kecenderungan alamiah manusia untuk berinteraksi. Tepi laut ini dapat dijadikan sebagai tempat pertemuan-pertemuan informal dengan keluarga dan sahabat. Bahkan ruang publik seperti ini kerap menjadi pertemuan spontanitas, tidak terencana. Masyarakat kota Makassar seringkali memanfaatkan tepi laut untuk kegiatan kemasyarakatan seperti lomba Agustusan, sepak bola, voli, jalan santai, peringatan hari besar nasional, pertunjukan seni dan kebudayaan lainnya.

“Pantai atau tepi laut biasanya juga dijadikan tempat alternatif untuk kegiatan kemasyarakatan. Seperti lomba-lomba agustusan, sepak bola, jalan santai, Maulidan, pementasan dan kegiatan lapangan lainnya” (Wawancara dengan A).

Setelah ruang tepi laut Kota Makassar banyak dikelola menjadi tempat wisata, kawasan ini relatif mulai dipadati oleh pengunjung dari luar daripada masyarakat sekitar. Pengunjung memanfaatkan tepi laut untuk berendam, nongkrong, jogging, jalan-jalan, bermain dan menikmati keindahan laut. Sedangkan masyarakat sekitar terpaksa beralih profesi menjadi pedagang kaki lima, penyedia jasa tempat peristirahatan, hingga petugas keamanan dan kebersihan. Aktivitas sosial masyarakat tepi laut yang dahulunya sebagai pelaut, mulai banyak ditinggalkan.

“Sekarang, banyak pantai yang sudah dikelola menjadi tempat wisata. Semakin banyak yang datang ke tepi laut untuk liburan. Banyak juga orang-orang tua yang mau berendam sebagai obat alami. Masyarakat sekitar, kebanyakan beralih pekerjaan menjadi penyedia jasa. Ada yang buka warung, gasebo, hingga menjadi petugas kebersihan pantai” (Wawancara dengan R)

Tepi laut yang dikelola secara komersial berdampak baik terhadap pengunjung yang memiliki modal ekonomi, karena akan mendapatkan berbagai pelayanan dan keistimewaan. Sebaliknya, berdampak buruk terhadap masyarakat ekonomi lemah dan sebagian masyarakat sekitar yang tidak mampu beradaptasi. Tepi laut yang telah dikelola hanya dinikmati oleh segelintir orang.

“Kalau pengunjung, lebih banyak yang bermobil. Artinya mereka orang berada. Untuk masuk ke sini memang ada biayanya, mulai biaya masuk di pintu gerbang, biaya parkir, toilet, sewa gasebo dan sebagainya” (Wawancara dengan AB)

Sebagai ruang publik tepi laut, fungsi sosialnya mengalami gangguan karena tidak semua lapisan masyarakat dapat mengaksesnya. Kebanyakan yang dapat mengaksesnya dari kalangan ekonomi mampu. Alhasil, kelas sosial ekonomi lemah cukup sulit lantaran memerlukan pembayaran mulai saat masuk, parkir, menyewa fasilitas hingga buang air. Ruang publik tepi laut telah mensegredasi sosial berdasarkan kemampuan ekonomi dari masyarakat.

Sebagaimana dinyatakan oleh Giddens (1984), pemahaman tentang bagaimana aktivitas manusia terdistribusi dalam ruang merupakan elemen mendasar dalam analisis kehidupan sosial. Interaksi manusia terjadi pada ruang-ruang tertentu yang mengandung berbagai makna sosial. Dalam konteks permasalahan kajian ini, teori ruang yang juga sering digunakan dalam tradisi Cultural Studies berkaitan dengan ruang kota.

Menurut Castells (1977) bahwa strukturasi dan restrukturisasi ruang sebagai lingkungan diciptakan melalui ekspansi kapitalisme industri. Geografi perkotaan bukanlah hasil dari kekuatan alamiah tetapi kekuatan kapitalisme dalam menciptakan pasar dan menguasai tenaga kerja. Komodifikasi dan pencarian pasar baru yang digerakkan oleh korporasi kapitalis membuat mereka peka terhadap pertanyaan tentang keuntungan relatif mereka.

Konsep ruang sebagai ruang sosial dapat kita telusuri dari latar belakang Lefebvre yang merupakan pemikir Marxis. Lefebvre sebelumnya memberikan konsep ruang absolut dan ruang abstrak yang dipengaruhi pemikiran Marx tentang buruh dalam proses produksi. Marx mengatakan bahwa dalam sistem kapitalis, buruh sebagai entitas konkret (absolut) telah dilinierkan menjadi entitas abstrak. Tenaga kerja diperhitungkan sebagai satuan waktu kerja yang nantinya akan dimasukkan dalam perhitungan komoditi yang dihasilkan, sehingga buruh sebagai entitas mutlak (manusia) berubah menjadi abstraksi di dalam komoditi.

Begitu pula ruang, Lefebvre melihatnya sejalan dengan pemikiran Marx, bahwa ruang dalam dunia kapitalis saat ini telah mengalami “sublimasi” sehingga teralienasi menjadi sesuatu yang abstrak. Kekuatan modal menentukan desain dan alokasi ruang-ruang baru sesuai dengan kepentingan mereka. Ruang tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang konkret yang menghadirkan realitas aktivitas manusia penghuninya, tetapi akan dilihat hanya sebagai desain atau gagasan ideal dengan modal kepentingan di baliknya.

Lefebvre juga merinci beberapa kontradiksi yang mengiringi perkembangan ruang-ruang abstrak sebagai produk kapitalisme, salah satunya adalah hilangnya ruang bersama yang dikuasai rezim Hak Milik (*private property*). Alhasil, ruang-ruang komunal yang sarat aktivitas sosial berubah menjadi ruang-ruang privat yang sarat kepentingan modal untuk bisa mengaksesnya. Ruang tepi laut kota Makassar, juga tidak terlepas dari sublimasi sehingga menjadi ruang abstrak produk kapitalisme.

Produksi ruang merupakan peleburan ranah konseptual dan disaat yang sama adalah kegiatan material. Di sinilah kita memasuki tahap kapitalisme maju seperti yang dikatakan Lefebvre, kita sudah melewati tahap memproduksi barang di dalam ruang, sekarang kita memproduksi ruang itu sendiri. Ruang telah menjadi komoditas. Pendiannya diproduksi sebagai abstraksi ruang oleh para desainer dan arsitek yang merencanakan ruang sebagai citra ideal untuk penataan kawasan perkotaan. Ruang abstrak ini tentu saja hanya ideal pada level konsep dan di hadapan para desainernya. Ruang tepi laut kota Makassar telah menjadi ruang abstrak yang didesain untuk segmen masyarakat tertentu, yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi.

KESIMPULAN

Ruang tepi laut kota yang sebelumnya merupakan ruang untuk hidup bersama, tempat kapal nelayan berangkat dan berlabuh, tempat menyambut keluarga melaut, tempat tawar menawar pembeli ikan, kini sebagian telah diprivatisasi untuk akumulasi kapital. Aktivitas sehari-hari masyarakat nelayan yang merupakan fungsi sosial dari tepu laut semakin memudar seiring dengan pengelolaan kawasan tepi laut menjadi tempat wisata. Ruang tepi laut yang dulunya dapat diakses dengan mudah, bebas waktu, tanpa biaya kini terbalik. Ruang-ruang tersebut kini hanya dapat diakses oleh kelas sosial yang memiliki kemampuan ekonomi. Sebagai ruang publik tepi laut, fungsi sosialnya terganggu karena tidak semua lapisan masyarakat dapat

mengaksesnya. Kebanyakan yang dapat mengaksesnya dari kalangan ekonomi mampu. Alhasil, kelas sosial ekonomi lemah cukup sulit lantaran memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ruang publik tepi laut telah mensegregasi sosial berdasarkan kemampuan ekonomi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang menyertai dalam penyusunan tulisan ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat luas untuk bangsa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M., Mulyadi, R., Amalia, A. A., Amal, C. A., Nur, K. W., & Latif, S. (2022). Penataan Kampung Nelayan Barombong dengan Pendekatan Green Architecture. *Journal of Muhammadiyah's Application Technology*, 1(2), 109–116.
- Asriany, S., Silas, J., & Soemarno, I. (2011). Peran Ruang Publik Di Permukiman Masyarakat Menengah Ke Bawah Kawasan Panakkukang Makassar. *Prosiding Seminar Nasional The Local Tripod: Akrab Lingkungan, Kearifan Lokal Dan Kemandirian*, 171–177.
- Brodin. (2006). *Public Space. Exploration of a Concept. Western Political Science Association Annual meeting Albuquerque*.
- Budihardjo, E., & Sujarto, D. (1999). *Kota berkelanjutan*. Alumni.
- Campo, D. (2002). Brooklyn's Vernacular Waterfront. *Journal of Urban Design*, 7(2), 171–199.
- Carmona, M., de Magalhães, C., & Hammond, L. (2008). *Public Space: The Management Dimension*. Routledge.
- Castells, M. (1977). *The Urban Question: A Marxist Approach*. London: Edward Arnold. Edward Arnold.
- Chua, B. H., & Edwards, N. (1992). *Public Space: Design, Use and Management*. NUS Press.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Darmawan, E. (2005). Ruang Publik dan Kualitas Ruang Kota. *Proceeding. Seminar Nasional PESAT*, 35–43.
- Dewi, R. P. (2019). Studi Kasus-Metode Penelitian Kualitatif. *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong*.
- Ditjen Penataan Ruang. (2004). *Pedoman Pemanfaatan Ruang Tepi Pantai Perkotaan*. Departemen Pekerjaan Umum.
- Doucet, B. (2010). *Rich cities with poor people: Waterfront regeneration in the Netherlands and Scotland*. Utrecht University.
- Dovey, K. (2005). *Fluid city: Transforming Melbourne's urban waterfront*. Routledge.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (2008). *An English-Indonesian Dictionary*. Gramedia Pustaka Utama.
- Giddens, A. (1984). *Elements of the theory of structuration*. Routledge.
- Jurgen, H. (1991). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT press.
- Kurniawati, N. (2021). Indeks Keterbukaan Ruang Publik Kota Makassar (Studi Kasus Pantai Losari, Pantai Akkarena, Tanjung Bayang). *Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 10(1), 134–144.
- Latuapo, A. (2022). Masa Depan Pendidikan Agama Dan Tantangan Pluralisme Agama Dalam Ruang Publik Global. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 9(1), 135–155.
- Lincoln, S. A. (1995). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. UPP AMPYKPN.
- Malik, A. (2018). Ruang Publik sebagai Representasi Kebijakan dan Medium Komunikasi Publik. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 6(2), 82–88.
- Maruzy, A. Al. (2020). *15 Tempat Wisata Terbaik dan Populer di Kota Makassar*. Berakhirpekan.Com. <https://www.berakhirpekan.com/2018/07/tempat-wisata-di-kota-makassar.html>
- Piknik Wisata. (2023). *11 Pantai Terindah di Makassar*. Piknikwisata.Com. <https://piknikwisata.com/sulsel/makassar/pantai/terbaik/>

- Rahardjo, M. (2017). *Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya*.
- Sayidah, N. (2018). *Metodologi Penelitian. Disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*. Zifatama Jawara.
- Siahaan, J. (2010). *Ruang Publik: Antara Harapan dan Kenyataan*. BPN. <https://docplayer.info/258530-Ruang-publik-antara-harapan-dan-kenyataan-oleh-ir-james-siahaan-ma.html>
- Soenarno. (2002). *Sambutan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Dalam Rangka Seminar Manajemen Ruang Publik Jakarta*. Ikatan Mahasiswa Perencanaan Indonesia Korwil Ii.
- Stake, R. (1995). *The Art Of Case Study Research*. CA: Sage.
- Sugiyanto, E., & Sitohang, C. A. (2017). Optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau sebagai ruang publik di taman Ayodia Kota Jakarta Selatan. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 205–218.
- Sunaryo, R. G. (2010). Perubahan Setting Ruang dan Pola Aktivitas Publik di Ruang Terbuka Kampus UGM. *Seminar Nasional Riset Arsitektur Dan Perencanaan (SERAP) 1*, 176–182.
- Surjana, O. (2017). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Ruang Publik Pantai Losari Makassar. *Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan*, 1(1), 53061.
- Syafriny, R., Tondobala, L., JWaani., & Fela Warouw. (2013). Place Making Di Ruang Publik Tepi Laut Kota Manado. *MEDIA MATRASAIN*, 10(1).
- Tripcetera. (2023). *12 Pantai Terindah di Makassar yang Wajib Anda Kunjungi*. Tripcetera.Com. <https://blog.tripcetera.com/id/pantai-di-makassar/>
- Wrenn, D. (1983). *Urban Waterfront Development*. ULI-The Urban Land Institute. Washington DC.
- Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods*. CA: Sage.